

BAB III

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Faktor – faktor Yang mempengaruhi Terjadinya Aksi Penolakan Pada Pemilihan Kepala Daerah Di Provinsi Kalimantan Utara

- **Perilaku Masyarakat**

Suku Dayak merupakan suatu suku yang besar dan mempunyai kelompok suku yang sangat banyak dengan budaya yang beranekaragam, masyarakat suku Dayak hidup dan berkembang di wilayah pedalaman pulau Kalimantan. Suku Dayak memiliki beberapa sub suku bangsa namun perbedaan kebudayaan yang ada relatif kecil, hal ini disebabkan mereka berasal dari garis keturunan yang sama. Kebudayaan masyarakat suku Dayak dapat terlihat dari unsur-unsur budaya seperti: sistem religi yaitu suatu keyakinan atau kepercayaan yang dianut sebagai wujud hubungan antara manusia dan penciptanya, sistem organisasi dalam masyarakat yang mengatur hubungan antar masyarakat sehingga terjalin hubungan yang harmonis, sistem kekerabatan dimana silsilah keluarga menjadi sangat penting karena rasa kekeluargaan suku Dayak sangat kuat sehingga mereka memiliki kesatuan yang kuat, sistem mata pencarian dimana mereka hidup dengan berladang sehingga secara alami akan membentuk suatu kebiasaan dalam hidup sehari-hari dan pada saat itu juga peralatan serta teknologi yang digunakan masih sangat sederhana. Kesemuanya itu merupakan unsur kebudayaan yang mempunyai peran yang sangat

penting dalam pembentukan karakter, pola hidup, serta pola pikir suku Dayak yang kesemuanya tercermin dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kebudayaan yang mereka miliki melahirkan satu konsep hidup yaitu: keterbukaan dan kebersamaan yang sangat mereka junjung tinggi dalam setiap aktifitas kehidupan baik itu dalam keluarga maupun dalam kemasyarakatan namun semuanya itu berlaku hanya antara suku Dayak saja. Dalam melakukan berbagai macam aktifitas mereka selalu melakukannya secara bersama-sama karena dengan begitu pekerjaan akan menjadi mudah dan cepat. Dapat diketahui bagaimana pola hidup, pola pikir serta kebudayaan yang terjadi dalam masyarakat dan itu semua akan tergambar pada penataan ruang rumah tinggal mereka. Aktifitas suku Dayak lebih banyak dilakukan di dalam rumah baik itu pendidikan anak, sosial ekonomi, bahkan pusat kekuasaan mengatur tata kehidupan masyarakat dengan kata lain rumah bagi suku Dayak rumah merupakan pusat kebudayaan (Yovinus, 2015: 8). Sedangkan untuk mengetahui menurut wawancara penulis dengan responden, di sampaikan sebagai berikut :

1. Sentimen Kedaerahan

“Tidak ada istilah pendatang, seluruh wilayah republik ini boleh berkiprah atau beraktivitas, siapa yang di katakan pendatang. Kalau menurut saya semua yang ada di bumi ini pendatang karena kita tidak bisa menentukan kita lahir dan tetap dimana dan kita tidak bisa memilih bapak saya itu suku apa mama saya suku apa. Tapi saya ingin bilang begini, calon gubernur yang terpilih kalau menurut kami itu adalah bagian dari warga Kalimantan, Kalimantan Timur juga. Jadi saya rasa tidak tepat kalau memakai bahasa pendatang, bahwa secara aturan mekanisme tentang pemilihan kepala daerah tidak ada pembatasan, lain

kemudian cuma wacana tentang seperti daerah Papua, Aceh. Mereka itu daerah otonomi khusus, jika di Papua ada namanya Perdasus (Peraturan Daerah Khusus). Sedangkan kita tidak, kita bukan daerah istimewa sehingga siapapun yang memenuhi syarat memenuhi undang – undang untuk pencalonan dia berhak untuk mencalonkan” (Suryanata, 2016).

“Kalo saya melihat itu bukan kapasitas dalam menilai seperti itu, karena KPU kemarin dalam wilayah regulasi UU artinya protes pun berkaitan dengan pemilu, kalo soal permasalahan etnis atau sudut pandang pasti ada tolak ukur tersendiri untuk menilai itu dan KPU terutama saya secara pribadi tidak melihat seperti itu, tetapi bentuk ketidakpuasan dan kekecewaan dalam wilayah politik. Artinya itu dalam segi yang mas pertanyakan tadi itu bisa di kaji lebih dalam dari beberapa orang” (Chairulliza, 2016).

“Jadi sebenarnya untuk sentimen kedaerahan secara spesifik tidak, artinya kalo secara umum kita lihat yang menang ini orang dari luar tidak ada sama sekali rasa sentimen, kalo secara khusus kita lihat dengan cara personal dari individu mungkin ada hanya beberapa orang saja, karena masyarakat mungkin menginginkan yang terpilih jadi gubernur yaitu putra daerah artinya yang saya lihat dengan kasat mata modelnya seperti itu” (Lili Suryani, 2016).

“Ya ada, karena tim sukses dari calon no 1 itu maunya yang menjadi gubernur adalah putra daerah apalagi pilkada ini yang pertama kalinya yang di selenggarakan di provinsi Kalimantan utara” (Hasmiah, 2016).

“Ada, karena yang menjadi pemenang adalah bukan dari putra daerah, tetapi pada dasarnya kalau bukan putra daerah tapi bisa memajukan daerah itu lebih baik, dari pada mementingkan kepentingan pribadi masing – masing pihak” (Anna, 2016).

“Iya pasti ada rasa sentimen kedaerahan, mengingat pasangan yang menang adalah bukan putra daerah” (Riduansyah, 2016).

2. Niat Untuk Marah

“Jadi begini, saya perlu sampaikan dulu penyelenggara pemilu itu secara luas ada dua, yang pertama itu adalah KPU, yang kedua Bawaslu. Ini mulai jajaran dari tingkat pusat sampai ketingkatan paling bawah, KPU itu memiliki tugas melaksanakan tahapan secara teknis dari awal hingga akhir, kemudian Bawaslu tugasnya mengawasi seluruh rangkaian tahapan yang di laksanakan KPU. Jadi tugasnya mengawasi penyelenggaraan yang di lakukan oleh KPU, termasuk calon – calon hingga partai politik yang di usung. Terkait pelanggaran – pelanggaran apakah itu yang di lakukan oleh penyelenggara dalam hal ini KPU atau pelanggaran yang di lakukan oleh pasangan calon, timnya, partai politik, atau masyarakat secara luas maka yang punya kewenangan menindak itu adalah bawaslu. Kalau pemicu faktor yang kemarin bahwa KPU tentu yang kami lakukan sudah benar seluruh rangkaian proses tahapan dimana ada beberapa argumentasi yang di sampaikan oleh tim yang kalah ini bahwa terdapat ribuan pemilih yang tidak bisa menggunakan hak pilih karena tidak dapat surat undangan untuk memilih. Ada namanya C6, jadi C6 itu bukan surat undangan bahwa C6 itu adalah surat pemberitahuan tentang pelaksanaan hari pemilihan salah satu pemberitahuan, bahwa itu bukan salah satu acuan orang datang ke TPS dia bisa memilih, orang tidak dapat C6 tetapi dia terdaftar di dalam pemilihan tetap, dia boleh menggunakan hak pilih. Jika tidak mempunyai C6 dia bisa datang ke TPS, dia periksa DPT yang di tempel, jika namanya ada langsung saja lapor kepada ketua kpps bahwa namanya ada dan nomor urutnya sampaikan saja, pun jika namanya tidak ada di DPT apakah bisa untuk memilih, “bisa” dengan cara menggunakan KTP dan KK. Hanya saja memang menggunakan hak pilihnya tidak seperti pemilihan yang terdaftar di DPT, jadi sebenarnya itu yang mereka sesalkan, mereka tidak dapat mengikuti hak pilih karena tidak mendapatkan surat C6. Jauh hari pihak KPU sudah mengsosialisasikan, pertama C6 itu bukan surat undangan tetapi surat pemberitahuan, bahkan KPU itu memperluaskan informasi kepada masyarakat tentang hari pemilihan kita umumkan bahkan sampai kerumah ibadah, masjid – masjid, gereja – gereja. Dan juga ada katanya money politik, perlu pembuktian yang jelas apakah ada atau tidak tentang money politik ini. Tidak perlu langsung menghakimi orang, ada yang namanya proses, selanjutnya ada keterlibatan aparat sipil negara dalam hal ini pegawai, jadi menurut mereka bahwa ada upaya kelompok – kelompok lain memiliasi ASN untuk memilih pasangan calon – calon tertentu. Tiga laporan ini menjadi tugasnya bawaslu untuk menangani, terkait dari C6 tadi yang banyak tidak di dapati itu di kota tarakan, kami sudah memberikan penjelasan kepada bawaslu terkait laporan salah satu pasangan calon tentang tidak mendapatkan C6. Anggota KPU sudah memberikan penjelasan kepada panwas kota Tarakan, itu bagian dari klarifikasi lalu di buat kesimpulan apakah ini pelanggaran di tindaklanjuti atau tidak. Lalu money politik, bawaslu yang menangani

keadaan ini yang tugasnya sebagai pengawas. Jika pelanggarannya itu administratif maka rekomendasikan kepada KPU untuk di tindaklanjuti. Selanjutnya terkait ASN bahwa yang namanya pegawai tidak boleh berpolitik, bahwa bawaslu sudah merekomendasi kepada komisi ASN terkait hasil kajian mereka. KPU Kalimantan Utara juga sudah melaksanakan tahapan yang namanya rapat pleno rekapitulasi hasil perolehan suara pemilihan gubernur di tingkat provinsi, di laksanakan di gedung serbaguna kantor gubernur. Pada saat pelaksanaan itu kemudian teman – teman yang melakukan aksi unjuk rasa ini merapat mendekati pelaksanaan kegiatan rekapitulasi”(Suryanata, 2016).

“Pada dasarnya pilkada ini pilkada yang pertama kali, banyak aturan – aturan dan regulasi yang baru juga dan kemarin dalam pilkada pasti ada yang menang dan ada yang kalah, kebetulan yang kemarin melakukan protes atau demo mengatas namakan masyarakat peduli demokrasi, bawasannya mereka kronologisnya seperti ini: Beberapa sebelumnya mereka melakukan protes terutama terkait dengan dugaan yang di asumsikan sebagai pelanggaran terhadap bawaslu, dan di bawaslu juga beberapa laporan juga sudah mereka lakukan artinya sudah mereka masukkan dan termasuk di KPU juga sempat di datangi. Saya kira itu adalah hal yang baik karena kepedulian demokrasi ya dimana kita di tuntutan dan kontrol sebagai alat integritas. Pada titik akhirnya waktu pelaksanaan rekapitulasi suaradi semua Kabupaten Provinsi dan menetapkan pasangan calon pemenang dan pelaksanaan kebetulan di lakukan di kantor gubernur atau aula kantor gubernur, karena di KPU yang sekarang ini masih tempat KPU sementara jadi tidak bisa memuat banyak orang. Pleno kita lakukan di sana, saat itu ada massa yang datang dan mereka menuntut sebetulnya kepada bawaslu untuk laporan – laporan mereka segera di tindak lanjuti sehingga mereka berharap bawaslu mengeluarkan rekomendasi terkait dugaan laporan yang mereka masukkan. Dan pada titik akhir pelaksanaan KPU tetap berjalan sesuai dengan jadwal yang kita tentukan dan sesuai dengan UU. Selesai pleno mereka juga masih menggelar aksi itu dan dari bawaslu belum mengeluarkan rekomendasi. Menurut saya itu alasan yang menjadi pemicu dan sempat rapat pleno mau di hentikan. Untuk ingin tau pemicunya mungkin perlu beberapa pihak bukan cuma KPU saja”(Chairulliza, 2016).

“Untuk konflik yang terjadi bermula dari rapat pleno perhitungan hasil rekapitulasi suara, dimana salah satu dari tim sukses itu menolak hasil rekapitulasi tersebut dan tidak menandatangani dan melanggar, sehingga bagaimana terjadinya demo itu sendiri memang sudah di persiapkan”(Lili Suryani, 2016).

“Kemungkinan dari tim sukses calon no urut 1, karena banyaknya orang – orang atau tokoh – tokoh Tanjung Selor mendukung pihak Irianto”(Hasmiah, 2016).

“Pemicu kemarahan konflik berasal dari masing – masing tim sukses dan dari provokator itu sendiri”(Anna, 2016).

“Di mulai dari banyaknya dukungan yang terlibat dari para tokoh agama, tokoh masyarakat, dan para pejabat daerah terhadap pasangan Irianto”(Riduansyah, 2016).

3. Niat Untuk Sabar

“Pasca kami di lantik bulan februari, kami bersilaturahmi kepada tokoh – tokoh, pertama tentunya kami menyampaikan permohonan doa dan mohon dukungan dari Tokoh – tokoh agama, Tokoh adat, dan Tokoh masyarakat. Ini bagian upaya kami mengantisipasi kemungkinan – kemungkinan terburuk pada saat proses atau bahkan setelah, jadi itu kami coba lakukan bahkan termasuk teman – teman aparat TNI POLRI juga kami sudah bersilaturahmi sejak awal. Pada saat kejadian tentu peran – perannya tokoh juga ikut membantu dimana kami sudah melakukan komunikasi dari awal untuk ikut meredakan kelompok – kelompok yang ingin melakukan aksi dan sebagainya. Termasuk saya kira teman – teman keamanan selain bagaimana mereka memastikan bahwa unjuk rasa dan lain sebagainya itu berjalan tertib dan juga pada saat kejadian aparat sudah mengingatkan bahwa ada hal – hal yang harus di ingat terkait undang – undang seabaginya. Jadi yang membantu menenangkan suasana teman – teman aparat juga ikut membantu”(Suryanata, 2016).

“Dalam wilayah konflik bukan petugas KPU ya, karena kita punya aparat keamanan yang berkewajiban mengamankan situs tersebut. KPU tidak mempunyai konteks meredam atau mendamaikan hal ini, karena bentuk aksinya sudah lumayan panas ya bagi saya itu kewenangan dari pihak keamanan”(Chairulliza, 2016).

“Pihak yang berperan dalam mendamaikan kericuhan pada saat itu adalah aparat kepolisian kemudian salah satu pihak bawastu juga menenangkan masa dalam peristiwa tersebut”(Lili Suryani, 2016).

“Yang berusaha mendamaikan kericuhan dari tokoh – tokoh masyarakat dan pihak aparat kepolisian”(Hasmiah, 2016).

“Yang berusaha untuk mendamaikan yaitu dari pihak KPU dan aparat Kepolisian”(Anna, 2016).

“Yang berusaha mendamaikan dari pihak aparat kepolisian”(Riduansyah, 2016).

4. Niat Untuk Mistik

“Saya tidak begitu paham bahwa di libatkannya dukun atau segala macam, tapi lazimnya dalam dunia politik semua kekuatan di kerahkan, jadi apakah ini ada di gunakan dalam pasangan calon saya tidak begitu tau. Tapi sah – sah saja selama tidak merugikan tatanan demokrasi yang ada di Indonesia”(Suryanata, 2016).

“Saya tidak tau apa ada atau tidak yang terlibat dukun dan sebagainya. Karena kita tidak bisa menjangkau kapasitas kesitu”(Chairulliza, 2016).

“Kalo masalah melibatkan dukun atau paranormal saya kurang paham, mungkin kembali ke individunya dan timnya masing – masing. Menurut rumor ada yang melibatkan dukun untuk memperoleh suara sebanyak – banyaknya, tapi tidak tau betul atau tidak tindakan seperti itu”(Lili Suryani, 2016).

“Secara kasat mata tidak ada terlibat dukun atau hal yang mistik sebelumnya”(Hasmiah, 2016).

“Tidak pernah menggunakan hal semacam mistik”(Anna, 2016).

“Sepengetahuan saya tidak sama sekali”(Riduansyah, 2016).

- **Budaya**

Budaya merupakan hal yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan siapa pun, termasuk pulau yang terkenal dengan hutan hujan tropisnya ini. Sedangkan untuk mengetahui menurut wawancara penulis dengan responden, di sampaikan sebagai berikut :

1. Tingkat Kecerdasan

“Saya kira Kalimantan Utara optimis sebagai anak kaltara, bahwa kalimantan Utara ini memiliki potensi sebagaimana yang di miliki di daerah – daerah lain, hanya saja mungkin spirit kita yang masih rendah, menurut saya tuhan itu maha adil, kita lihat adilnya itu bisa sederhana saja. Tuhan menciptakan kita sama semua, paling yang membedakan cuma warna kulit, postur dan sebagainya. Sederhananya lagi posisi otak orang luar negeri dengan orang indonesia sama semua tempatnya, lalu

kemudian beratnya sama, hanya saja kita belum mengelola secara maksimal potensi yang Tuhan kasih ke kita, saya pikir banyak lah orang – orang pintar di kaltara”(Suryanata, 2016).

“Ohh sangat masih kalo untuk mengandalkan intelektual, kalimantan utara banyak tokoh – tokoh hebat termasuk semua para kandidat calon mempunyai gelar dalam wilayah intelektual bahkan mempuni. Termasuk masyarakatnya juga ada banyak gelar doctor yang ada di kalimantan utara ini. Intelektual di kaltara masih terjaga dan terjamin mempunyai posisi masih tinggi di banding sifatnya yang masih mistis dll”(Chairulliza, 2016).

“Pasti ada yang mengandalkan intelektual karena pemimpin harus mempunyai intelektual, masyarakat juga tau pemimpin harus mempunyai intelektual apa lagi dalam pemilihan gubernur karena yang ikut pilkada juga rata – rata S2 dan doctor”(Lili Suryani, 2016).

“Iya tapi tidak 100%, karena masih ada yang mengandalkan aspek kekeluargaan dan keterpihakan kesukaan atau agama”(Hasmiah, 2016).

“Ada, pasti ada jika tidak mementingkan kepentingan pribadi, tapi mungkin belum tepat pada orangnya”(Anna, 2016).

“Ya, intelektual nomor satu saat ini, faktor kesukaan dan agama juga menjadi alasan masyarakat untuk memilih calon pemimpin”(Riduansyah, 2016).

2. Tingkat Moral

“Masyarakat di kalimantan utara ini kan masyarakat yang santun, cinta damai, bahwa kemudian kita ini bisa bangkit jika kemudian kita tidak manja. Maka kita bangkit bisa mengelola potensi yang ada di kalimantan utara ini. Potensi intelektual, potensi sumber daya alam, potensi kultural kita sudah luar biasa. Kultur kita ini unik, di besarkan oleh 3 intetitas terbesar, ada bulungan, tidung, dan dayak. Masing – masing mempunyai seni yang luar biasa dan belum banyak di kenal di luar, saya kira generasi muda yang ada di kalimantan utara perlu terus menggali potensi yang ada, khususnya potensi budaya”(Suryanata, 2016).

“Tolong menolong ini pastinya di bidang kemanusiaan atau sosial, artinya masyarakat di Kaltara masih rukun walaupun berbeda suku”(Chairulliza, 2016).

“Jadi untuk dana kampanye semua sudah di batasi kemudian pada saat kegiatan kampanye brosur, spanduk sudah di sediakan oleh KPU,

sehingga hanya beberapa poin yang di keluarkan pada saat kampanye”(Lili Suryani, 2016).

“Dibidang ekonomi dan pendidikan”(Hasmiah, 2016).

“Di bidang sosial karena saling berusaha bersosialisasi untuk mendekatkan kepada masyarakat”(Anna, 2016).

“Dibidang ekonomi dan pendidikan”(Riduansyah, 2016).

3. Tingkat Seni

“Dari pengamatan kami semua pasangan calon itu menampilkan budaya, dari seni tari yang ada di kalimantan utara inilah terutamanya. Jadi dua pasangan calon ini selalu menampilkan intetitas asli kalimantan utara sebagai acara menghibur masyarakat. Saat ini mungkin yang di kedepankan dimana semangat cinta terhadap tradisi”(Suryanata, 2016).

“Dalam pantauan kita sebetulnya itu dalam pengawasan bawaslu jadi bisa di konfirmasikan ke bawaslu. KPU cuma memfasilitasi dalam segi kampanye, tapi terkait dengan budaya lokal itu masih sangat di tonjolkan. Contohnya ceremony menggelar tari – tarian dayak, tarian tidung. Terutama maskot yang di pakai saat pilkada adalah maskot yang berupa gajah mini sebuku yang orang banyak tidak begitu tau kalo gajah mini tersebut adalah kearifan lokal dari kalimantan utara sendiri. Kalo di KPU masih sangat menjunjung tinggi budaya kearifan lokal karena sangat penting untuk suatu daerah dan agar daerah yang lain tau apa budaya lokal dari provinsi kalimantan utara”(Chairulliza, 2016).

“Ada, ya pastinya ada melibatkan keterampilan budaya daerah seperti tari dayak, tari bulungan, dan tari tidung”(Lili Suryani, 2016).

“Menurut saya budaya yang jujur, saling menghormati terhadap umat beragama. Selain itu para calon menghadirkan beberapa tari kesenian untuk menghibur masyarakat”(Hasmiah, 2016).

“Selama melakukan kampanye banyak mengikut sertakan tradisi tari daerah seperti tari bulungan, tari dayak, dan tari tidung”(Anna, 2016).

“Toleransi terhadap umat beragama”(Riduansyah, 2016.)

- **Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA)**

Pemilihan Kepala Daerah adalah pemilihan umum yang dilakukan di daerah dengan penyelenggara komisi pemilihan umum daerah diikuti oleh beberapa pasangan calon baik yang di usung oleh partai politik maupun secara independen. Sedangkan untuk mengetahui menurut wawancara penulis dengan responden, di sampaikan sebagai berikut :

1. Memilih Pemilih Cerdas/Kreatif

“Kategori masyarakat kita sekarang ada beberapa kategori, ada yang memilih seseorang itu karena kedekatan secara kultural, memilih secara emosional, tetapi ada juga pemilih yang cerdas, dia melihat sejauh mana atau apa saja program – program yang akan di lakukan oleh para calon pemimpin, tentu mereka butuh proses perbandingan. Jadi masyarakat sudah mulai cerdas untuk membedah program – program yang di tawarkan oleh pasangan calon, itu di dukung dimana pada peraturan undang – undang” (Suryanata, 2016).

“KPU sifatnya melakukan pendidikan di masyarakat artinya suara tertinggi ada di masyarakat, KPU sebagai menjembatani atau memperkenalkan siapa saja calon gubernur, yang dapat menilai dan berpotensi suara terbanyak ya dari masyarakat” (Chairulliza, 2016).

“Rata – rata seperti itu harus punya ide pembaharuan untuk kedepannya” (Lili Suryani, 2016)

“Usaha khusus saya belum tau, tapi yang jelas adalah melihat hasil kerja calon gubernur secara nyata, dan sejauh mana tingkat pembangunan yang di rasakan selama menjabat menjadi pemimpin daerah” (Hasmiah, 2016).

“Memilih itu pasti ya, tapi yang di pilih betul – betul mau membangun daerah, dan selalu berpihak kepada masyarakat, bukan pada kepentingan sendiri dan tim suksesnya” (Anna, 2016).

“Ya pasti ada, karena pasangan Irianto terpilih karena masyarakat melihat dan merasakan pembangunan di Kab. Bulungan khususnya selama Irianto menjadi PJ. Gubernur sebelumnya”(Riduansyah, 2016).

2. Tidak Pernah Ada Salah

“Dalam persyaratan menjadi calon itu melampirkan surat dari kepolisian (SKCK) jadi itu sudah termasuk dokumen yang wajib”(Chairulliza, 2016).

“Kalo yang terlibat masalah hukum di masa lalunya jelas tidak ada, karena sebelumnya para calon ini pasti sudah di periksa tentang masa lalunya. Kalo pun ada terlibat masalah hukum, pastinya juga di lolos di pencalonan ini”(Lili Suryani, 2016).

“Sepengetahuan saya pasangan irianti tidak pernah terlibat hukum atau kasus selama menjadi pejabat”(Hasmiah, 2016).

“Alhamdulillah belum ada saya mendengar para calon gubernur ini terlibat masalah pada masa lalunya”(Anna, 2016).

“Menurut saya pasangan Irianto tidak pernah terlibat kasus hukum”(Riduansyah, 2016).

3. Memilih Pemilih Simpatik/Menarik Hati

“Iyaa, karena setiap calon yang ingin jadi pemimpin pasti mempunyai janji – janji, semoga janji – janji itu dapat terlaksanakan sebaik mungkin”(Lili Suryani, 2016).

“Masyarakat saat ini sudah lebih intelektual, karena pilihan mereka rata – rata melihat hasil kerja seorang pemimpin yang mereka rasakan, bukan dari hasil janji – janji saja”(Hasmiah, 2016).

“Ada masyarakat yang benar – benar memilih Gubernur karena integritas dan dedikasi yang tinggi calon Gubernur, tapi tidak sedikit juga masyarakat yang terbuai oleh janji – janji pidato calon Gubernur tanpa melihat atau memperdulikan hasil kerja calon Gubernur tersebut”(Riduansyah, 2016).

- **Sentimen Kedaerahan (Primordialisme)**

Sentimen kedaerahan yang bernuansa primordial dan cenderung chauvinis mulai merebak pasca dimulainya transformasi ke demokrasi tahun 1999. Hal ini terjadi tentu saja, karena kuatnya tekanan Centralistik Orde Baru yang mengekang “integrasi palsu”, yang menekan daerah serta mengekspolitasinya. Bagaimana centralistik kekuasaan tersebut akhirnya melahirkan perlawanan yang justru kemudian tampil sebagai bentuk ketidakpatuhan lokal yang cenderung bersifat chauvinis, dan ego kedaerahan. Chauvinisme sebagai bentuk kesukuan yang tentu negatif dapat memicu perpecahan Persatuan Kesatuan Nasional. Sentimen Kedaerahan yang dapat mengancam pluralisme “persatuan dan kesatuan Indonesia” bahkan dapat terjadi ketika Pilkada - pilkada berlangsung, terutama sekali bila dalam UU yang akan datang dicantumkan “Kepala daerah harus putra daerah”. Karena Indonesia adalah pulau - pulau, provinsi - provinsi, kecamatan - kecamatan, kelurahan, kampung, dusun, desa, rw, rt. Kalau orang yang lahir di Indonesia saja tidak dapat mengabdikan di daerah dalam wilayah Indonesia apalagi WNI yang lahir di Luar Negeri (ayah Ibu orang asli Indonesia) lalu dibesarkan, dan bekerja berkeringat di Indonesia. Padahal jika saja sentimen kedaerahan diarahkan pada hal-hal yang positif: seperti menggali kekayaan dan kearifan budaya lokal, maka yang ditemukan adalah nilai-nilai toleransi yang tinggi, keterbukaan, saling menghargai pendatang ataupun pribumi (penduduk asli). Bukti - bukti dari itu semua tersebar di seluruh negeri Indonesia. Yang diperlukan

kini adalah mengedepankan sentimen individu ke arah kompetensi individu untuk memajukan diri, mencintai diri untuk berbuat baik untuk daerahnya lalu bagi Indonesia secara umum.

Tentunya hal ini hanya dapat terjadi jika bermula dari dalam diri individu masing-masing. Seorang yang tinggal, besar dan dilahirkan di daerah tertentu, maka ia dilahirkan dalam potensi yang melekat di daerah itu (termasuk dalam keluarga itu). Karena bagi mereka yang lahir di Indonesia seharusnya ia dapat menjadi manusia terbaik, karena ia lahir di Negeri Terbaik di seluruh Dunia. Negeri yang memiliki apa saja di dalamnya kekayaan alam, laut, gunung, hutan. Juga kekayaan dan keragaman budaya. Sedangkan untuk mengetahui menurut wawancara penulis dengan responden, di sampaikan sebagai berikut:

“Tidak ada istilah pendatang, seluruh wilayah republik ini boleh berkiprah atau beraktivitas, siapa yang di katakan pendatang. Kalau menurut saya semua yang ada di bumi ini pendatang karena kita tidak bisa menentukan kita lahir dan tetap dimana dan kita tidak bisa memilih bapak saya itu suku apa mama saya suku apa. Tapi saya ingin bilang begini, calon gubernur yang terpilih kalau menurut kami itu adalah bagian dari warga Kalimantan, Kalimantan Timur juga. Jadi saya rasa tidak tepat kalau memakai bahasa pendatang, bahwa secara aturan mekanisme tentang pemilihan kepala daerah tidak ada pembatasan, lain kemudian cuma wacana tentang seperti daerah Papua, Aceh. Mereka itu daerah otonomi khusus, jika di papua ada namanya Perdasus (Peraturan Daerah Khusus). Sedangkan kita tidak, kita bukan daerah istimewa sehingga siapapun yang memenuhi syarat memenuhi undang – undang untuk pencalonan dia berhak untuk mencalonkan” (Suryanata, 2016).

“Kalo saya melihat itu bukan kapasitas dalam menilai seperti itu, karena KPU kemarin dalam wilayah regulasi UU artinya protes pun berkaitan dengan pemilukada, kalo soal permasalahan etnis atau sudut pandang pasti ada tolak ukur tersendiri untuk menilai itu dan KPU terutama saya secara pribadi tidak melihat seperti itu, tetapi bentuk ketidakpuasan dan kekecewaan dalam wilayah politik. Artinya itu dalam

segi yang mas pertanyakan tadi itu bisa di kaji lebih dalam dari beberapa orang”(Chairulliza, 2016).

“Jadi sebenarnya untuk sentimen kedaerahan secara spesifik tidak, artinya kalo secara umum kita lihat yang menang ini orang dari luar tidak ada sama sekali rasa sentimen, kalo secara khusus kita lihat dengan cara personal dari individu mungkin ada hanya beberapa orang saja, karena masyarakat mungkin menginginkan yang terpilih jadi gubernur yaitu putra daerah artinya yang saya lihat dengan kasat mata modelnya seperti itu”(Lili Suryani, 2016).

“Ya ada, karena tim sukses dari calon no 1 itu maunya yang menjadi gubernur adalah putra daerah apalagi pilkada ini yang pertama kalinya yang di selenggarakan di provinsi kalimantan utara”(Hasmiah, 2016).

“Ada, karena yang menjadi pemenang adalah bukan dari putra daerah, tetapi pada dasarnya kalau bukan putra daerah tapi bisa memajukan daerah itu lebih baik, dari pada mementingkan kepentingan pribadi masing – masing pihak”(Anna, 2016).

“Iya pasti ada rasa sentimen kedaerahan, mengingat pasangan yang menang adalah bukan putra daerah”(Riduansyah, 2016).

Selanjutnya penulis sampaikan pengamatan penulis dalam bentuk tabel berikut ini:

Tabel 3.1 Obeservasi

No	Hari/Tanggal	Jabatan	Ket
1	Selasa, 14 Juni 2016	Komisioner KPU	- Wawancara dengan komisioner KPU tentang Pilkada - Meminta profil KPU
2	Selasa, 14 Juni 2016	KPU	- Wawancara dengan salah satu anggota KPU tentang Konflik

3	Selasa, 17 Juni 2016	Pendukung No 1	- Wawancara dengan salah satu pendukung No 1 tentang Konflik
4	Jumat, 18 Juni 2016	Pendukung No 2	- Wawancara dengan salah satu pendukung No 2 tentang Konflik
5	Jumat, 18 Juni 2016	Pendukung No 2	- Wawancara dengan salah satu pendukung No 2 tentang Pilkada
6	Senin, 20 Juni 2016	KPU	- Wawancara dengan Ketua KPU tentang Pilkada

**Sumber: Hasil Penelitian*